

**POLITISASI PROFESI GURU OLEH PEMERINTAH DAERAH  
STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN III**

Khaf Shah<sup>1</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>1</sup>[khafshah01@gmail.com](mailto:khafshah01@gmail.com), <sup>2</sup>[msirozi@radenfatah.ac.id](mailto:msirozi@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*The politicization of the teaching profession by local governments is a phenomenon that has sparked debate in the context of education in Indonesia. This research aims to investigate the practice of politicization of the teaching profession by the Regional Government of Banyuasin III Regency. Case studies were conducted to gain an in-depth understanding of how this politicization occurs, its impact on teachers, students, and the education system as a whole, as well as the efforts made to overcome or minimize this practice. Qualitative research methods were used, including in-depth interviews with teachers, government officials, and other stakeholders, as well as analysis of policy documents and related secondary data. The research results show that the politicization of the teaching profession in Banyuasin III Regency is reflected in various aspects, ranging from teacher placement based on political affiliation to political influence in curriculum development. This has led to instability in the educational environment, inequality in educational opportunities, and a decline in the overall quality of education. However, there are efforts from a number of parties to combat the politicization of the teaching profession, including through community advocacy, developing independent teachers, and strengthening supervision mechanisms.*

**Keywords:** *local government, politicization, teaching profession*

**ABSTRAK**

Politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah merupakan fenomena yang telah memicu perdebatan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi praktik politisasi profesi guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin III. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana politisasi ini terjadi, dampaknya terhadap guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan praktik tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan, termasuk wawancara mendalam dengan guru, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta analisis dokumen kebijakan dan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuasin III tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari penempatan guru berdasarkan afiliasi politik hingga pengaruh politik dalam

pengembangan kurikulum. Hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan dalam lingkungan pendidikan, ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan, dan penurunan mutu pendidikan secara keseluruhan. Meskipun demikian, ada upaya dari sejumlah pihak untuk melawan politikalisisasi profesi guru, termasuk melalui advokasi masyarakat, pembinaan guru independen, dan penguatan mekanisme pengawasan.

**Kata Kunci:** pemerintah daerah, politisasi, profesi guru

### **A. Pendahuluan**

Politik dan pendidikan merupakan dua bidang yang saling berhubungan dan seringkali berpotensi menimbulkan kontroversi. Salah satu isu yang menonjol dalam hubungan ini adalah politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah (Lamadang et al., 2022). Politisasi profesi guru mengacu pada proses dimana keputusan-keputusan yang berkaitan dengan karier, penempatan, dan tugas guru dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan, integritas profesi guru, dan keseluruhan sistem pendidikan (Rohanah, 2019).

Di Indonesia, peran guru tidak hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa guru berada di bawah tekanan politik, yang

mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas profesional (Dimyati, 2019). Politisasi ini bisa berbentuk berbagai kebijakan pemerintah daerah yang cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu, intervensi dalam proses rekrutmen dan promosi, hingga tekanan untuk mendukung kegiatan politik tertentu.

Fenomena politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap sistem pendidikan. Hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan karena keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan politik daripada meritokrasi. Selain itu, politisasi dapat mengakibatkan penurunan moral dan motivasi di kalangan guru, yang pada akhirnya berpengaruh pada proses belajar-mengajar dan hasil belajar siswa (Ibda, 2019). Politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah merupakan isu krusial yang berdampak langsung

pada kualitas pendidikan dan integritas profesi guru. Dalam konteks Indonesia, peran guru sebagai agen perubahan sosial dan budaya seringkali terhambat oleh tekanan dan intervensi politik (Permana & Sos, 2021).

Politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuasin III mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, di mana kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada profesionalisme dan kualitas pendidikan. Guru sering kali ditempatkan tidak berdasarkan kebutuhan sekolah atau kompetensi mereka, melainkan karena afiliasi politik dan hubungan personal. Kebijakan semacam ini mengabaikan prinsip meritokrasi dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpuasan di kalangan guru. Penempatan yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja guru dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa (Suparmin & Adiyono, 2023).

Politisasi ini berpotensi merusak lingkungan kerja di sekolah. Guru-guru yang merasa ditekan atau dipengaruhi oleh kepentingan politik mungkin akan kehilangan motivasi dan semangat dalam mengajar.

Mereka mungkin merasa tidak dihargai atas kinerja dan kompetensi mereka, tetapi lebih pada afiliasi politik mereka. Hal ini tentu berdampak negatif pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Selain itu, budaya kerja yang terbentuk akibat politisasi bisa menjadi tidak kondusif, di mana kolaborasi dan profesionalisme digantikan oleh persaingan dan ketidakpercayaan (Sherly et al., 2021).

Pentingnya memahami politisasi profesi guru juga tercermin dalam konteks global, di mana banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga independensi dan profesionalisme guru (Ashidiqie & Hakim, 2023). Meskipun berbeda-beda dalam detailnya, masalah politisasi profesi guru sering kali berkaitan dengan persaingan kepentingan politik di dalam sistem pendidikan. Misalnya, dalam beberapa kasus, guru yang menunjukkan kesetiaan politik kepada pemerintah bisa mendapatkan penghargaan atau promosi, sementara yang lain mungkin diabaikan atau bahkan diberi hukuman (Fernando & Sirozi, 2023). Tidak hanya itu, politisasi

profesi guru juga menimbulkan implikasi sosial yang mendalam. Pendidikan seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, profesional, dan berkualitas tinggi di Kabupaten Banyuasin III. Dengan menyoroti dan memahami isu politisasi, diharapkan ada upaya kolaboratif antara pemerintah, komunitas pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan lebih baik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, transparan, dan mendalam, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk media informasi. Esensi dari penelitian ini adalah pemahaman mendalam, sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Ramdhan, 2021). Memahami fenomena secara kasat mata mungkin terlihat mudah, namun sebenarnya membutuhkan kejelian dalam mengamati setiap fenomena

yang terjadi terkait objek penelitian. Metode ini digunakan oleh peneliti.

Menurut (Abdussamad & Sik, 2021) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori dalam penelitian pada satu waktu tertentu dengan rancangan studi kasus. Arikunto (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal yang telah disebutkan, dengan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah merupakan fenomena yang menarik dan kompleks, terutama di wilayah seperti Kabupaten Banyuasin III. Profesi guru, yang seharusnya netral dan fokus pada pendidikan, seringkali menjadi objek politisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Politisasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengangkatan dan mutasi guru berdasarkan afiliasi politik hingga tekanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu guru tetapi juga pada kualitas pendidikan

secara keseluruhan (Zulfitri et al., 2019). Dalam konteks Kabupaten Banyuwasin III, politisasi profesi guru memiliki dampak yang luas dan beragam. Guru yang terlibat dalam politik mengalami penurunan motivasi dan profesionalisme, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa. Selain itu, keterlibatan kegiatan politik dapat menciptakan ketegangan dan perpecahan di antara guru, yang menghambat kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Pembahasan ini akan menguraikan hasil temuan dari penelitian, menganalisis dampaknya, dan mengaitkannya dengan teori serta literatur yang relevan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuwasin III dan implikasinya terhadap pendidikan.

### **1. Bentuk Politisasi Profesi Guru**

Politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuwasin III terjadi dalam berbagai bentuk yang mempengaruhi kehidupan profesional dan pribadi para guru. Salah satu bentuk utama politisasi adalah

pengangkatan dan mutasi guru yang seringkali didasarkan pada afiliasi politik atau hubungan dekat dengan pejabat pemerintah daerah, bukan pada kompetensi atau kinerja profesional. Selain itu, gurud i daerah juga mengalami tekanan untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri kampanye yang sering kali disertai ancaman atau iming-iming imbalan. Keterlibatan dalam kampanye politik juga menjadi bentuk lain dari politisasi, di mana guru diminta untuk menyebarkan materi kampanye atau memobilisasi siswa dan orang tua untuk mendukung kandidat tertentu.

Praktik ini tidak hanya mengaburkan batas antara peran profesional dan politik guru, tetapi menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan tidak kondusif bagi pengembangan pendidikan yang berkualitas (Ilyas, 2022). Observasi menunjukkan bahwa pengangkatan dan mutasi guru seringkali dipengaruhi kepentingan politik. Guru yang memiliki afiliasi politik atau hubungan dekat dengan pejabat daerah cenderung mendapatkan posisi yang lebih baik atau dipindahkan ke sekolah yang lebih strategis (Jamil, 2022).

Guru seringkali mengalami tekanan untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri kampanye atau mendukung kandidat tertentu. Tekanan ini tidak jarang disertai ancaman atau janji imbalan. Beberapa guru dilibatkan dalam kampanye politik oleh pejabat daerah. Mereka diminta untuk menyebarkan pamflet atau memobilisasi siswa dan orang tua untuk mendukung kandidat tertentu (Maizuar et al., 2022).

## **2. Dampak Politisasi terhadap Guru dan Pendidikan**

Politisasi profesi guru memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi dan profesionalisme para guru di Kabupaten Banyuwangi III. Guru yang dipaksa atau tertekan untuk terlibat dalam kegiatan politik seringkali kehilangan semangat dan dedikasi terhadap tugas utama mereka sebagai pendidik. Keterlibatan dalam politik tidak hanya menguras waktu dan energi mereka, tetapi juga menimbulkan stres dan kecemasan, mengganggu fokus mereka dalam mengajar. Guru yang dipilih atau dimutasi berdasarkan afiliasi politik juga merasa tidak adil, mengurangi rasa percaya diri dan mempengaruhi kinerja mereka di dalam kelas. Secara keseluruhan,

atmosfer kerja yang diwarnai oleh intervensi politik merusak moral dan profesionalisme guru (Dimiyati, 2019).

Dampak dari politisasi ini juga terlihat jelas pada kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. Guru yang terlibat dalam politik atau yang tertekan oleh kepentingan politik seringkali tidak dapat memberikan perhatian penuh pada pengajaran dan pembelajaran. Fokus mereka terpecah antara memenuhi tuntutan politik dan menjalankan tugas pendidikan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pembelajaran, dimana siswa tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Selain itu, perubahan posisi guru seringkali tidak berdasarkan kompetensi dapat mengganggu kontinuitas dan stabilitas proses belajar mengajar, sehingga berdampak negatif pada prestasi akademik siswa (Octavia, 2020).

Ketegangan dan perpecahan di antara para guru juga merupakan dampak signifikan dari politisasi. Guru yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau yang melihat rekan mereka dipromosikan karena afiliasi politik cenderung merasa tidak puas dan tidak percaya terhadap sistem. Hal ini menimbulkan konflik

internal dan menghambat kerja sama serta kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan harmonis dan produktif (Purwaningsih & Muliandari, 2021).

Ketidakpercayaan dan kecemburuan di antara guru dapat memperburuk suasana kerja, mengurangi efektivitas tim pengajar, dan pada akhirnya, merugikan siswa. Secara keseluruhan, dampak politisasi terhadap guru dan pendidikan di Kabupaten Banyuasin III sangat merugikan dan memerlukan perhatian serius untuk diatasi. Politisasi berdampak negatif pada motivasi dan profesionalisme guru. Guru yang merasa terpaksa mengikuti arahan politik cenderung kehilangan semangat kerja dan dedikasi terhadap tugas mereka sebagai pendidik. Kualitas pendidikan terpengaruh oleh politisasi ini.

Fokus guru yang seharusnya pada pembelajaran terganggu oleh kegiatan politik. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di sekolah terdampak. Politisasi menciptakan ketegangan, perpecahan di antara guru yang terlibat politik untuk mendapatkan perlakuan istimewa, yang menimbulkan kecemburuan dan konflik.

### **a. Pengaruh Politik Terhadap Pengangkatan dan Mutasi Guru**

Pengangkatan dan mutasi guru yang dipengaruhi oleh kepentingan politik di Kabupaten Banyuasin III menunjukkan bagaimana intervensi politik dapat merusak sistem manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam banyak kasus, pengangkatan guru atau mutasi mereka ke sekolah-sekolah tertentu tidak didasarkan pada kompetensi atau kebutuhan institusional, melainkan pada afiliasi politik atau hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah daerah. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga pengajar yang berkualitas di berbagai sekolah (Bagou & Suling, 2020). Guru-guru yang memiliki koneksi politik mendapatkan posisi yang lebih baik atau dipindahkan ke sekolah yang lebih diinginkan, sementara yang tidak memiliki koneksi tersebut mungkin diabaikan atau ditempatkan di lokasi yang kurang strategis. Kondisi ini juga berdampak negatif pada motivasi dan moral guru. Guru yang merasa bahwa promosi atau mutasi mereka ditentukan oleh faktor politik, bukan kinerja atau dedikasi mereka,

cenderung merasa tidak dihargai dan frustrasi. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja dan mengurangi kualitas pengajaran (Mulyasa, 2021).

Adanya diskriminasi dalam pengangkatan dan mutasi juga menimbulkan rasa tidak adil di antara para guru, yang bisa berujung pada ketegangan dan konflik internal di lingkungan sekolah. Ketidakpuasan ini dapat mempengaruhi suasana kerja secara keseluruhan dan mengganggu kerja sama serta solidaritas di antara guru. Lebih jauh, politisasi dalam pengangkatan dan mutasi guru juga dapat menghambat perkembangan profesional mereka. (Ronaldo & Darmaiza, 2021).

Secara keseluruhan, intervensi politik dalam pengangkatan dan mutasi guru mengganggu proses pendidikan yang seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pengajaran. Dengan menempatkan pertimbangan politik di atas kepentingan pendidikan, pemerintah daerah menciptakan sistem yang tidak efisien dan tidak adil, yang pada akhirnya berdampak buruk pada seluruh ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang transparan dan berbasis

meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan, guna memastikan bahwa semua guru diberi kesempatan yang adil untuk maju berkembang dan memberikan kontribusi terbaik.

Pengangkatan dan mutasi guru yang dipengaruhi oleh kepentingan politik menunjukkan adanya intervensi politik dalam manajemen pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Sudaryono (2018). Bahwa fenomena politisasi memerlukan kejelian dalam mengamati setiap tindakan yang dilakukan pemangku kepentingan. Intervensi ini sangat mengakibatkan tidak meratanya distribusi guru berkualitas di sekolah, karena keputusan diambil berdasarkan afiliasi politik.

### **b. Tekanan Politik dan Profesionalisme Guru**

Tekanan politik yang dialami oleh guru di Kabupaten Banyuwangi III memiliki dampak yang mendalam dan kompleks terhadap profesionalisme mereka. Guru sering kali dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti mendukung kampanye atau menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan pejabat lokal (Kholda et al., 2024). Situasi ini menempatkan mereka dalam posisi



yang sulit, karena mereka harus memilih antara memenuhi tuntutan politik atau mempertahankan integritas profesional mereka.

Tekanan semacam ini tidak hanya mengganggu fokus mereka pada tugas utama sebagai pendidik tetapi juga menciptakan rasa takut dan kecemasan. Guru yang merasa terpaksa mengikuti arahan politik mungkin kehilangan semangat dan dedikasi terhadap pekerjaan mereka, karena mereka merasa peran mereka sebagai pendidik tidak dihargai (Ako, 2023) . Ketika guru dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, waktu dan energi mereka yang seharusnya digunakan untuk persiapan mengajar, pengembangan profesional, dan interaksi dengan siswa menjadi teralihkan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas, karena guru tidak dapat memberikan perhatian penuh pada tanggung jawab mereka.

Selain itu, tekanan politik ini sering kali disertai dengan ancaman atau iming-iming imbalan, yang semakin memperburuk situasi. Guru yang menerima ancaman merasa terancam keamanan dan stabilitas pekerjaan mereka, sementara yang

menerima imbalan mungkin merasa bersalah atau tidak nyaman karena telah melanggar prinsip-prinsip profesional mereka. Intervensi politik juga berdampak pada hubungan antar guru. Ketika beberapa guru terlibat dalam kegiatan politik dan menerima perlakuan istimewa, hal ini menciptakan ketidakadilan dan kecemburuan di antara rekan kerja. Guru yang tidak terlibat dalam politik merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di sekolah.

Suasana kerja yang tidak harmonis ini menghambat kolaborasi dan kerja sama yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Guru-guru yang berada dalam situasi ini sering kali merasa terisolasi dan kurang termotivasi untuk berkontribusi secara penuh (Gunanto & Sahrul, 2023) . Lebih jauh, tekanan politik yang berkelanjutan dapat merusak reputasi profesi guru secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mulai memandang guru sebagai alat politik daripada pendidik yang berdedikasi. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan mengurangi penghargaan terhadap profesi guru.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi minat individu yang berkualitas untuk memasuki profesi guru, karena mereka tidak ingin terlibat dalam lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh politik. Penurunan minat ini berdampak negatif pada ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar di masa depan. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya serius untuk menjaga netralitas politik dalam profesi guru. Kebijakan yang tegas dan transparan harus diterapkan untuk melindungi guru dari tekanan politik dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, penting untuk membangun budaya sekolah yang mendukung dan menghargai kontribusi guru, tanpa intervensi politik. Dengan demikian, guru dapat fokus pada tugas utama mereka sebagai pendidik dan memberikan kontribusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin III.

Tekanan politik yang dialami guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik berdampak buruk pada profesionalisme mereka. Guru yang seharusnya berperan sebagai

pendidik dan pemimpin di sekolah terpaksa terlibat dalam aktivitas politik, yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Mukhtar (2013) mencatat bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menemukan pengetahuan dalam konteks tertentu, dan temuan ini menggarisbawahi bagaimana konteks politik lokal dapat merusak etos kerja guru.

### **c. Dampak Politisasi terhadap Kualitas Pendidikan**

Politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuasin III memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, mengakibatkan berbagai masalah yang menghambat perkembangan siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Salah satu dampak paling nyata adalah terganggunya fokus guru terhadap tugas utama sebagai pendidik. Keterlibatan dalam kegiatan politik dan tekanan untuk mendukung agenda politik tertentu membuat guru kehilangan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Akibatnya, kualitas pengajaran menurun, yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar siswa. Ketika guru tidak dapat

memberikan perhatian penuh pada tugas mengajar, siswa tidak mendapatkan pendidikan yang optimal dan kemampuan akademis mereka menjadi terbatas. Selain itu, keputusan pengangkatan dan mutasi guru yang didasarkan pada afiliasi politik alih-alih kompetensi profesional juga merusak kualitas pendidikan. Guru yang ditempatkan di posisi tertentu bukan karena keahlian mereka, tetapi karena hubungan politik, mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Hal ini menciptakan ketidakcocokan antara kebutuhan pendidikan dan kemampuan guru, yang menghambat proses belajar mengajar. Akibatnya, siswa tidak menerima pendidikan yang sesuai dengan standar yang diharapkan, yang berdampak pada pencapaian akademis dan perkembangan holistik mereka.

Intervensi politik juga menciptakan lingkungan sekolah yang tidak stabil, yang berdampak negatif pada siswa. Ketegangan dan konflik yang timbul di antara guru akibat politisasi menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Lingkungan penuh ketidakpastian

dan perselisihan ini tidak hanya mengganggu konsentrasi guru tetapi juga siswa. Siswa yang berada dalam lingkungan yang tidak harmonis dan penuh dengan ketidakpastian cenderung merasa tidak aman dan kurang termotivasi untuk belajar. Ketidakstabilan ini mempengaruhi iklim sekolah secara keseluruhan seharusnya menjadi tempat aman dan mendukung bagi pembelajaran. Lebih jauh, politisasi dalam pendidikan merusak hubungan sekolah dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa guru dan sekolah terlibat dalam politik, kepercayaan terhadap institusi pendidikan menurun.

Masyarakat mulai meragukan objektivitas dan integritas guru, yang seharusnya menjadi panutan bagi siswa. Keraguan ini mengurangi partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan sekolah, yang sebenarnya sangat penting untuk keberhasilan pendidikan. Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih sulit dan kurang efektif. Untuk mengatasi dampak negatif dari politisasi terhadap kualitas pendidikan, diperlukan langkah-langkah konkret

untuk memastikan bahwa keputusan terkait pengangkatan, mutasi, dan tugas guru didasarkan pada pertimbangan profesional dan kebutuhan pendidikan. Kebijakan yang tegas dan transparan harus diterapkan untuk menjaga netralitas politik dalam dunia pendidikan.

Upaya untuk membangun budaya sekolah yang mendukung dan menghargai profesionalisme guru harus diperkuat. Dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan berfokus pada pendidikan, kualitas pembelajaran ditingkatkan, dan siswa dapat mencapai potensi penuh mereka. Hanya dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Banyuasin III dapat berkembang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masa depan. Kualitas pendidikan yang menurun akibat politisasi profesi guru mencerminkan politik bisa mengorbankan masa depan pendidikan. Arikunto (2013) menyatakan penelitian deskriptif bertujuan menyelidiki kondisi tertentu dan memaparkan hasilnya dalam bentuk laporan. Penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi tidak hanya mempengaruhi individu guru tetapi juga merugikan siswa dan keseluruhan sistem pendidikan

#### **d. Ketegangan Antar Guru**

Ketegangan antar guru di Kabupaten Banyuasin III menjadi salah satu dampak yang cukup serius dari politisasi profesi guru. Fenomena ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan tidak kondusif bagi kolaborasi yang efektif di antara tenaga pengajar. Salah satu sumber ketegangan adalah ketidakadilan dalam pengangkatan dan mutasi guru yang didasarkan pada pertimbangan politik. Guru-guru yang merasa bahwa keputusan manajemen sumber daya manusia tidak didasarkan pada kompetensi atau kinerja mereka, tetapi pada afiliasi politik, cenderung merasa tidak puas dan tidak dihargai. Perasaan ketidakpuasan ini bisa menciptakan ketegangan antara guru-guru, yang dapat mengganggu kerjasama dan solidaritas di sekolah.

Ketegangan antar guru juga muncul karena adanya perlakuan istimewa terhadap mereka yang memiliki afiliasi politik atau hubungan dekat dengan pejabat daerah. Guru-guru yang mendapatkan promosi atau fasilitas tertentu karena koneksi politik mereka mungkin dianggap tidak adil oleh rekan-rekan mereka yang tidak memiliki keuntungan

serupa. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan diantara pengajar dan meningkatkan ketegangan di tempat kerja. Guru-guru yang merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil cenderung merasa frustrasi dan tidak termotivasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka. Selain itu, politisasi profesi guru juga dapat memicu konflik personal di antara tenaga pengajar.

Guru yang memiliki pandangan politik atau afiliasi yang berbeda mungkin saling berselisih atau bahkan berselisih terbuka di tempat kerja. Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu kerjasama tim tetapi menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Siswa yang menjadi saksi konflik merasa tidak aman atau tidak nyaman di sekolah, yang memengaruhi kenyamanan mereka dalam belajar. Ketegangan antar guru juga dapat menciptakan pembagian dan kubu di antara pengajar. Guruyang merasa tidak puas dengan perlakuan manajemen mungkin membentuk aliansi untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Hal ini menciptakan dinamika politik internal yang dapat mengganggu kerja sama dan kolaborasi yang efektif. Ketegangan semacam ini

tidak hanya merugikan atmosfer kerja tetapi juga berdampak pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, untuk mengatasi ketegangan antar guru, perlu adanya upaya untuk membangun budaya sekolah yang inklusif dan mendukung. Kepemimpinan yang kuat dan transparan juga penting untuk mengatasi ketidakpuasan dan konflik di antara staf pengajar.

Peluang untuk dialog dan komunikasi terbuka harus diperkuat, sehingga masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama dan saling pengertian di antara guru, sekolah dapat menjadi tempat yang baik untuk belajar dan berkembang. Ketegangan dan perpecahan di antara para guru akibat politisasi mencerminkan dampak sosial dari politisasi profesi. Hubungan kerja yang harmonis terganggu, yang pada akhirnya dapat menghambat kolaborasi dan kerjasama yang efektif di sekolah. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam profesi guru.

Politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuasin III memiliki dampak yang mendalam dan kompleks terhadap sistem pendidikan dan komunitas guru secara keseluruhan. Salah satu dampak utamanya adalah terhadap kualitas pendidikan, dimana fokus guru terganggu dan kinerja mereka terpengaruh oleh tekanan politik dan ketidakpastian dalam pengangkatan dan mutasi guru. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil belajar siswa.

Politisasi juga menciptakan ketegangan dan konflik antara guru-guru, yang mengganggu kerjasama dan solidaritas di sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat juga terpengaruh, dengan menurunnya kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas guru. Dampak politisasi terhadap guru secara langsung dapat memengaruhi profesionalisme. Guru sering kali merasa terbebani oleh tekanan politik dan perlakuan tidak adil dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan mengurangi motivasi dalam memberikan pengajaran yang berkualitas. Ketidakpuasan dan konflik di antara staf pengajar menciptakan atmosfer kerja yang tidak kondusif

bagi kolaborasi dan pengembangan pendidikan yang holistik. Selain itu, politisasi juga memicu perpecahan dan ketegangan personal di antara guru, yang dapat merusak hubungan interpersonal dan lingkungan belajar di sekolah.

Untuk mengatasi dampak negatif dari politisasi profesi guru, langkah konkret perlu diambil. Pemerintah daerah dan otoritas pendidikan harus memastikan bahwa keputusan terkait pengangkatan, mutasi, dan promosi guru didasarkan pada pertimbangan profesional dan kebutuhan pendidikan, bukan pada pertimbangan politik. Budaya sekolah yang mendukung kerja sama, transparansi, dan komunikasi terbuka juga harus ditegakkan, sehingga para guru dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan juga penting, untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi dampak politisasi pada hubungan antara sekolah dan komunitas. Secara keseluruhan, politisasi profesi guru bukan hanya masalah internal sekolah, tetapi juga merupakan isu yang memengaruhi kualitas dan

integritas pendidikan secara keseluruhan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, otoritas pendidikan, guru, dan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif politisasi dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Banyuasin III.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa politisasi profesi guru oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banyuasin III memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap motivasi, profesionalisme, dan kualitas pendidikan. Guru-guru yang terlibat dalam politik atau yang dipengaruhi oleh keputusan politik mengalami tekanan dan ketidakadilan, yang berujung pada penurunan kualitas pendidikan dan ketegangan di antara para guru. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meminimalkan intervensi politik dalam manajemen pendidikan dan menjaga integritas serta profesionalisme profesi guru. Dalam konteks politisasi profesi guru di Kabupaten Banyuasin III, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini

memiliki dampak yang serius terhadap sistem pendidikan dan komunitas guru secara keseluruhan. Politisasi mengganggu kualitas pendidikan dengan mengganggu fokus dan profesionalisme guru, serta menciptakan ketegangan antara staf pengajar. Perlakuan tidak adil dalam pengelolaan sumber daya manusia, tekanan politik, dan konflik interpersonal menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

Politisasi profesi guru memerlukan tindakan konkret dari pemerintah daerah, otoritas pendidikan, guru, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan terkait dengan pendidikan didasarkan pada pertimbangan profesional dan kebutuhan pendidikan. Diperlukan juga budaya sekolah yang mendukung kerja sama, transparansi, dan komunikasi terbuka agar para guru dapat bekerja dalam lingkungan kondusif. Meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan juga penting untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi dampak politisasi pada hubungan antara sekolah dan komunitas. Melalui upaya bersama ini, diharapkan Kabupaten Banyuasin III dapat mengatasi dampak negatif

politisasi profesi guru dan menjaga pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ako, R. (2023). Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Konawe Utara). *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 1(2), 152–158.
- Ashidiqie, H. F. K. A., & Hakim, A. R. (2023). Manajemen Guru Pada Otonomi Daerah (Desentralisasi). *TANZHIMUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(02), 461–475.
- Azima Dimiyati, M. M. (2019a). *Pengembangan Profesi Guru*. Gre Publishing.
- Bagou, D. Y., & Sukung, A. (2020). Analisis kompetensi profesional guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 122–130.
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000.
- Gunanto, D., & Sahrul, M. (2023). Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penundaan Pemilu). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 3(1), 56–67.
- Ibda, H. (2019). *Guru Dilarang Mengajar!: Refleksi Kritis Paradigma Didik, Paradigma Ajar, dan Paradigma Belajar*. CV. Asna Pustaka.
- Ilyas, I. (2022). Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(1), 34–40.
- Jamil, J. (2022). *Etika Profesi Guru*. CV. Azka Pustaka.
- Kholda, D., Safina, D. K., Latuheru, N. E., & Jabarullah, M. N. (2024). POTENSI POLITISASI DALAM REKRUTMEN ASN. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 83–93.
- Lamadang, K. P., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., & Febriani, W. D. (2022a). Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 63–76.
- Maizuar, M., Hasibuan, A., Putri, R., Ezwarsyah, E., Muhammad, M., & Zulnazri, Z. (2022). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 2(1), 26–29.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Deepublish.
- Permana, U., & Sos, S. (2021). *Pengaruh politisasi sara terhadap partisipasi masyarakat mengikuti pilpres 2019: Buku Lovrinz Publishing*. LovRinz Publishing.



- Purwaningsih, R. F., & Mulyandari, A. (2021). Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam: Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 61–71.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rohanah, E. (2019). *Publikasi Ilmiah Pengembangan Profesi Guru*. CV. Media Educations.
- Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Suparmin, S., & Adiyono, A. (2023). Implementasi Model Supervisi Distributif dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 143–169.
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(01), 89–103.
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini, I. (2019). Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. *LINGUA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 19(2), 130–136.